BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Peraktek

Peraturan Pemerintah tersebut mempertegas tanggung jawab instansi pengelola fiskal dan pengguna anggaran/barang untuk menyelenggarakan akuntansi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Sejak diterbitkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka kewajiban pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan pertanggung jawaban keuangan menjadi semakin nyata. Kewajiban penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, sampai dengan Presiden selaku kepala pemerintahan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan.

Otonomi daerah ini adalah bagian dari penyelenggaran pemerintah Negara kesatuan Replubik Indonesia. Otonomi uang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor faktor perhitungan tindkan dan

kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mempu mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar benar sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh lingkungan negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian otonomi bagi pemerintah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua daerah indonesia diberi hak otonomi sendiri. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertangung jawab bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan otonomi daerah. Maka setiap daerah dituntut untuk meningkatakan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Dengan berdirinya kota cimahi yang semula berstatus kota administratif cimahi, mengharuskan kota Cimahi untuk mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan terbentuknya kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani kebutuhaan masayarakat yang semakin kompleks. Kota cimahi akan berusaha memaksimalkan Pendapatan asli Daerahnya (PAD), hal ini mengacu pada pajak daerah yang berperan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Sesuai dengan undang-undang No. 31 Tahun 2000 setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan Undang-undang.

Pajak daerah dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting bagi pemerintah daerah yang berseumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Agar dapat dipingut secara efektif, memerlukan sosialisasi kepada masyarakay umum bahwa pemungutan pajak ini di tunjukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarkat.

Dinas pendapatan Kota Cimahi merupakan organisasi yang mengelola sumber pendapatan dan lain-lain pendapatan yang sah diwilayah Kota Cimahi.salah satu alat penunjang proses kegiatan yang dilakukan dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menarik perhatian umum kepada suatu baran, jasa atau orang yang ditempatkan yang dapat dilihat, dibaca, dan di dengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame harus dipungut dan dikelola sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut, penyusun tertarik untuk mengambil judul laporan kerja prakek ini adalah **"Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi"**

1.2 Tujuan Kerja Peraktek

Dalam hal ini penulis dalam menyusun laporan kerja praktek memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam laporan kerja praktek ini antra lain :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pajak reklame pada dinas pendapatan daerah Kota Cimahi
2. Untuk mengetahui Prosedur pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah Kota Cimahi
3. Untuk Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi

1.3 Kegunaan Kerja Peraktek

Penulis berharap dengan adanya laporan ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sejalan dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja praktek.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua kalangan baik bagi aspek keilmuan (teoritis) maupun bagi aspek guna laksana (praktis).

1. Kegunaan praktis

   Bagi instansi, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya informasi terkait Laporan Keuangan.

2. Kegunaan teoritis

   Untuk Pengembangan ilmu manajemen keuangan, memberikan referensi tentang dasar hukum dan jenis-jenis laporan apa saja yag dibuat dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Cimahi

1.4 Lokasi dan Waktu Peraktek

Lokasi tempat penulis melakukan kerja peraktek adalah di Pemda Kota Cimahi yang beralamat Jl. Rd Demang Hardjakusuma Blok Jati Cihanjuang laksankan pada tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 11 Agustus 2011 setap hari, dari hari senin sampai jumat. Waktu pelaksanaan dari jam 08.00 sampai dengan 16.00. dan waktu istirahat dari jam 12.00 s/d 13.00. Maka dari Untuk memrpoleh data dan informasi yang berkaitan dengan laporan kerja peraktek yang diteliti, penulisan mengadakan kerja peraktek atau observasi.

Tabel 1.1 Rencana Kerja Praktek

Pekerjaan/Aktivitas	Bulan						
	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Rencana kerja praktek	■						
Survei tempat kerja praktek		■					
Mengajukan izin praktek		■					
Penerimaan kerja praktek		■					
Pelaksanaan kerja praktek		■	■				
Penyusunan laporan kerja praktek				■	■		
Penyelesaian laporan kerja praktek						■	■

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
Senin - Jumat	Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB
Sabtu - Minggu	Libur